



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 113 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas No. 4 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	172.487.675.175,00	
b. Dana Perimbangan	Rp.	985.767.677.461,00	
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	288.151.420.981,00	
Jumlah Pendapatan			Rp. 1.446.406.773.617,00

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	888.512.353.318,00	
2) Belanja Hibah	Rp.	28.516.035.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	24.382.895.000,00	
4) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	48.774.830.944,00	
5) Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00	
			Rp. 993.186.114.262,00

a. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	67.691.934.860,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	216.103.168.397,00	
3) Belanja Modal	Rp.	254.640.072.064,00	
			Rp. 538.835.175.321,00
Jumlah Belanja			Rp. 1.531.621.289.583,00
Defisit			Rp. 85.214.515.966,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan	Rp.	120.964.515.966,00	
b. Pengeluaran	Rp.	35.750.000.000,00	
Jumlah Pembiayaan Neto		Rp.	85.214.515.966,00
Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan		Rp.	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

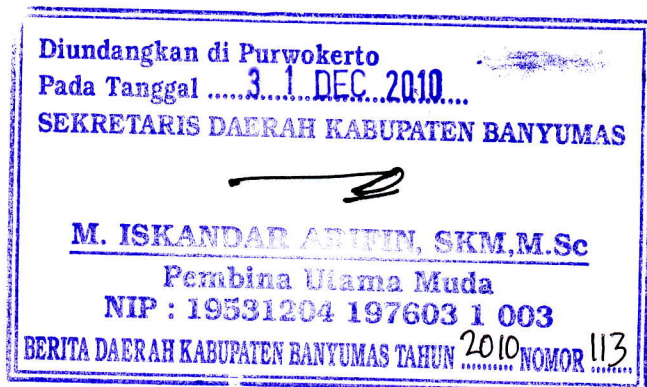
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 DEC 2010

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.446.406.773.617,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	172.487.675.175,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	38.106.322.369,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	39.666.781.518,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.669.549.507,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.045.021.781,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	985.767.677.461,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	55.868.451.461,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	835.991.326.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	93.907.900.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	288.151.420.981,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	54.063.146.633,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	206.654.630.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.105.515.000,00
1.3.6	Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	328.129.348,00
2	BELANJA	1.531.621.289.583,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	993.186.114.262,00
2.1.1	Belanja Pegawai	888.512.353.318,00
2.1.4	Belanja Hibah	28.516.035.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.382.895.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	48.774.830.944,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	538.435.175.321,00
2.2.1	Belanja Pegawai	67.691.934.860,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	216.103.168.397,00
2.2.3	Belanja Modal	254.640.072.064,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(85.214.515.966,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	120.964.515.966,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	115.464.515.966,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.750.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.750.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.500.000.000,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	85.214.515.966,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011

Lampiran Ia Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 113 Tahun 2010
Tanggal : 31 Desember 2010

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.446.406.773.617,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	172.487.675.175,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	38.106.322.369,00	
4.1.1.01.15	Hotel Bintang/Melati	1.727.000.000,00	
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.430.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.430.000.000,00	
4.1.1.03	Pajak Hiburan	330.000.000,00	
4.1.1.03.23	Hiburan tetap/incidental	330.000.000,00	
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.100.000.000,00	
4.1.1.04.12	Reklame	1.100.000.000,00	
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	22.572.145.369,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	22.572.145.369,00	
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	175.000.000,00	
4.1.1.06.10	Galian Gol C	175.000.000,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	80.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	80.000.000,00	
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah tanah	250.000.000,00	
4.1.1.12	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.442.177.000,00	
4.1.1.12.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	10.442.177.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	39.666.781.518,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	30.806.218.600,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.673.790.000,00	
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	215.005.800,00	
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	5.672.450.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	700.038.000,00	
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.003.600.000,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	540.834.800,00	
4.1.2.01.11	Lain-lain Retribusi Jasa Umum	500.000,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	5.859.657.102,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	681.055.152,00	
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	2.231.781.950,00	
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	363.210.000,00	
4.1.2.02.10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.518.610.000,00	
4.1.2.02.12	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	10.000.000,00	
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	55.000.000,00	
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	3.000.905.816,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.311.045.816,00	
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	304.350.000,00	
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	65.000.000,00	
4.1.2.03.07	Retribusi Izin Usaha Jasa Perdagangan	114.110.000,00	
4.1.2.03.08	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	45.000.000,00	
4.1.2.03.14	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	156.600.000,00	
4.1.2.03.15	Retribusi Izin Usaha Angkutan	2.000.000,00	
4.1.2.03.17	Retribusi Izin Hotel	2.000.000,00	
4.1.2.03.18	Retribusi Izin Hiburan	800.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.669.549.507,00	
4.1.3.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	4.769.549.507,00	
4.1.3.01.01	Perusahaan Daerah Air Minum	2.455.489.535,00	
4.1.3.01.02	BPR/BKK	2.314.059.972,00	
4.1.3.02	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	1.900.000.000,00	
4.1.3.02.01	Bank Pembangunan Daerah	1.900.000.000,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.045.021.781,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	50.400.000,00	
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	50.400.000,00	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.665.500.000,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.639.000.000,00	
4.1.4.02.02	Jasa Giro Pemegang Kas	26.500.000,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	1.000.000,00	
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan tertentu	1.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Fasilitas Umum Pendapatan dari Sewa Tanah Bengkok Pendapatan BLUD Pendapatan BLU Rumah Sakit	1.984.521.781,00	
4.1.4.11.01		1.140.000.000,00	
4.1.4.11.02		63.180.000,00	
4.1.4.11.03		781.341.781,00	
4.1.4.14		82.343.600.000,00	
4.1.4.14.01		82.343.600.000,00	
4.2	DANA PERTAMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Cukai Tembakau Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Jalan dan Jembatan Dana Alokasi Khusus Bidang Air Bersih Dan Sanitasi Dana Alokasi Khusus Bidang Perikanan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan dan KB Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Dana Alokasi Khusus Bidang Perhubungan dan Komunikasi LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	985.767.677.461,00	
4.2.1		55.868.451.461,00	
4.2.1.01		52.287.534.096,00	
4.2.1.01.01		39.015.692.889,00	
4.2.1.01.03		13.271.841.207,00	
4.2.1.02		3.580.917.365,00	
4.2.1.02.01		590.730.000,00	
4.2.1.02.07		248.450.000,00	
4.2.1.02.08		35.000.000,00	
4.2.1.02.09		6.000.000,00	
4.2.1.02.12		2.697.137.365,00	
4.2.1.02.13		3.600.000,00	
4.2.2		835.991.326.000,00	
4.2.2.01		835.991.326.000,00	
4.2.2.01.01		835.991.326.000,00	
4.2.3		93.907.900.000,00	
4.2.3.01		93.907.900.000,00	
4.2.3.01.01		51.366.900.000,00	
4.2.3.01.02		14.332.300.000,00	
4.2.3.01.03		15.640.800.000,00	
4.2.3.01.05		3.590.600.000,00	
4.2.3.01.06		5.500.900.000,00	
4.2.3.01.08		999.600.000,00	
4.2.3.01.09		1.216.000.000,00	
4.2.3.01.11		1.097.500.000,00	
4.2.3.01.12		253.300.000,00	
4.3		288.151.420.981,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil dari Pajak Rokok Bagi Hasil dari Air Tanah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan keuangan dari Provinsi Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Ketrbusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Bagi Hasil Retribusi Kelebihan Muatan Bagi Hasil Retribusi Tera dan Tera Ulang	54.063.146.633,00	
4.3.3.01		54.063.146.633,00	
4.3.3.01.01		15.172.103.000,00	
4.3.3.01.03		12.057.470.000,00	
4.3.3.01.05		20.147.944.000,00	
4.3.3.01.07		87.993.000,00	
4.3.3.01.12		6.347.636.633,00	
4.3.3.01.13		250.000.000,00	
4.3.4		206.654.630.000,00	
4.3.4.01		206.654.630.000,00	
4.3.4.01.01		110.000.000.000,00	
4.3.4.01.03		96.654.630.000,00	
4.3.5		27.105.515.000,00	
4.3.5.01	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan 2) Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Bersas 1) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Pembulatan Gaji Iuran Asuransi Kesehatan Uang Paket 1)	27.105.515.000,00	
4.3.5.01.01		27.105.515.000,00	
4.3.5.01.01		27.105.515.000,00	
4.3.6		328.129.348,00	
4.3.6.01		328.129.348,00	
4.3.6.01.01		286.795.000,00	
4.3.6.01.02		41.334.348,00	
5		1.531.621.289.583,00	
5.1		993.186.114.262,00	
5.1.1		888.512.353.318,00	
5.1.1.01		833.249.782.975,00	
5.1.1.01.01		521.601.125.945,00	
5.1.1.01.02		52.118.010.170,00	
5.1.1.01.03		11.117.836.204,00	
5.1.1.01.04		51.179.167.360,00	
5.1.1.01.05		14.447.952.285,00	
5.1.1.01.06		37.279.693.283,00	
5.1.1.01.07		15.495.299.657,00	
5.1.1.01.08		393.674.434,00	
5.1.1.01.09		11.587.624.097,00	
5.1.1.01.10		95.508.000,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah 2)	31.607.100,00	PP NO.52 TAHUN 2009 Tanggal 1 Desember 2009	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi 2)	61.387.200,00		
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran 2)	35.991.900,00		
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan 2)	13.337.100,00		
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)	55.723.500,00		
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan 2)	2.130.000.000,00		
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian 2)	477.540.000,00		
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00		
5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislasi Daerah	19.548.900,00		
5.1.1.01.21	Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru	114.715.635.840,00		
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	43.761.231.951,00		
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	20.998.431.951,00		
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas	802.800.000,00		
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan untuk guru	21.960.000.000,00		
5.1.1.03	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH	4.360.000.000,00		
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00		
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00		
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4.905.109.812,00		
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	3.221.338.392,00		
5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah	1.683.771.420,00		
5.1.1.05	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	2.216.228.580,00		
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Retribusi Daerah	2.216.228.580,00		
5.1.4	Belanja Hibah	28.516.035.000,00		
5.1.4.05	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	28.516.035.000,00		
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	28.516.035.000,00		
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	24.382.895.000,00		
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota Masyarakat	24.382.895.000,00		
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota -Pendidikan	12.615.545.000,00		
5.1.5.01.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota M-Keagamaan	1.435.000.000,00		
5.1.5.01.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Anggota M-Kesehatan	4.454.000.000,00		
5.1.5.01.04	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan-Pertanian, Perkebunan,Peternakan dan Perikanan	250.000.000,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.5.01.05	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat dan Ang Masy-Sosial Lainnya	5.588.350.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	48.774.830.944,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	47.405.000.000,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	30.805.000.000,00	
5.1.7.03.02	Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)	16.600.000.000,00	
5.1.7.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pihak Lainnya	1.369.830.944,00	
5.1.7.06.01	Bantuan Keuangan Kepada Pihak Lainnya	1.369.830.944,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	538.435.175.321,00	
5.2.1	Belanja Pegawai	67.691.934.860,00	
5.2.1.01	Honorarium PNS	32.254.404.485,00	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.695.596.000,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	423.725.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	185.845.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Pengelola Keuangan pada SKPD	2.951.105.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Jasa Pelayanan	23.998.133.485,00	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	12.873.678.100,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	1.835.310.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	8.680.266.100,00	
5.2.1.02.03	Upah Harian	2.180.057.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium PTT dengan Keputusan Bupati	178.045.000,00	
5.2.1.03	Uang Lembur	4.942.221.500,00	
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	4.438.301.000,00	
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	503.920.500,00	
5.2.1.04	Uang Makan	658.440.775,00	
5.2.1.04.01	Uang Makan	658.440.775,00	
5.2.1.05	Belanja Pegawai Pelayanan Kecamatan	151.751.000,00	
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai Pelayanan Bidang Pembangunan	25.291.000,00	
5.2.1.05.02	Belanja Pegawai Pelayanan Bidang Pemerintahan	59.885.200,00	
5.2.1.05.03	Belanja Pegawai Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	19.721.800,00	

NOMOR URUT	URATAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.1.05.04	Belanja Pegawai Pelayanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja alat tulis kantor Belanja dokumen/ administrasi tender Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) Belanja perangkat, material dan benda pos lainnya Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran Belanja pengisian tabung gas Belanja Bendera/Umbul-umbul/Layur Belanja Bahan Perlengkapan Kerja Belanja Barang/Jasa Lain Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Belanja Bahan/Material Belanja bahan baku bangunan Belanja bahan/bibit tanaman Belanja bibit ternak Belanja bahan obat-obatan Belanja bahan kimia Belanja Bahan Laboratorium Belanja Bahan Percontohan Belanja Bahan Pakan Ternak/Ikan Belanja Bahan Pangan Belanja Jasa Kantor Belanja telepon Belanja air Belanja listrik Belanja Jasa pengumpulan lelang/ pemenang lelang Belanja surat kabar/majalah Belanja kawat/faksimili/internet Belanja paket/pengiriman Belanja Sertifikasi Belanja Jasa Transaksi Keuangan Belanja Jasa Pihak Ketiga	46.853.000,00	
5.2.1.06		16.811.439.000,00	
5.2.1.06.01		16.811.439.000,00	
5.2.2		216.103.168.397,00	
5.2.2.01		10.915.059.515,00	
5.2.2.01.01		4.899.785.217,00	
5.2.2.01.02		33.079.950,00	
5.2.2.01.03		662.125.815,00	
5.2.2.01.04		205.335.000,00	
5.2.2.01.05		1.667.413.456,00	
5.2.2.01.06		2.102.212.200,00	
5.2.2.01.07		43.508.060,00	
5.2.2.01.08		676.284.159,00	
5.2.2.01.09		80.001.000,00	
5.2.2.01.10		494.314.718,00	
5.2.2.01.11		51.000.000,00	
5.2.2.02		39.484.629.767,00	
5.2.2.02.01		4.112.713.879,00	
5.2.2.02.02		657.414.000,00	
5.2.2.02.03		1.421.295.000,00	
5.2.2.02.04		26.861.269.952,00	
5.2.2.02.05		1.125.716.436,00	
5.2.2.02.06		1.055.000.000,00	
5.2.2.02.07		1.136.425.000,00	
5.2.2.02.09		135.195.500,00	
5.2.2.02.12		2.979.600.000,00	
5.2.2.03		26.281.299.078,00	
5.2.2.03.01		1.461.586.442,00	
5.2.2.03.02		613.702.835,00	
5.2.2.03.03		14.322.609.146,00	
5.2.2.03.04		111.744.000,00	
5.2.2.03.05		311.678.600,00	
5.2.2.03.06		723.702.000,00	
5.2.2.03.07		22.570.000,00	
5.2.2.03.08		161.420.000,00	
5.2.2.03.09		117.521.105,00	
5.2.2.03.12		5.167.007.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	644.503.200,00	
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Penyelenggaraan Pendidikan	12.260.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Publikasi	132.250.000,00	
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	229.190.150,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Akomodasi	31.300.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pengamanan	311.200.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	620.951.500,00	
5.2.2.03.22	Belanja Jasa Lainnya	336.267.000,00	
5.2.2.03.23	Belanja Hadiah	949.836.100,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	782.000.000,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)	712.000.000,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	70.000.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.084.955.862,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.820.293.642,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.306.629.691,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.713.017.729,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	7.836.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	236.998.800,00	
5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	180.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak Dan Pengandaan	7.106.278.128,00	
5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.750.034.447,00	
5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	2.356.243.681,00	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	631.575.000,00	
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	553.145.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	66.180.000,00	
5.2.2.07.04	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas	12.250.000,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	458.350.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	458.350.000,00	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	72.000.000,00	
5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	72.000.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor	646.805.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	85.520.000,00	
5.2.2.10.02	Belanja sewa komputer dan printer	11.000.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja sewa generator	37.000.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda	131.055.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	56.740.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan kantor	93.590.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.10.08	Belanja sewa peralatan dan perlengkapan pertunjukan Belanja sewa peralatan sound system Belanja Makanan Dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman tamu Belanja Pakaian Dinas Dan Atributya Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian kerja lapangan Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu Belanja pakaian adat daerah Belanja pakaian batik tradisional Belanja pakaian olahraga Belanja Perjalanan Dinas Belanja perjalanan dinas dalam daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja beasiswa tugas belajar D3 Belanja beasiswa tugas belajar S1 Belanja beasiswa tugas belajar S2 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS Belanja kursus-kursus Singkat Belanja Sosialisasi Belanja Bimbingan Teknis Belanja Ujian Dinas dan Seleksi Diklat Belanja Bantuan Transport Peserta Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Tanah Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Bermotor Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Tidak Bermotor	113.450.000,00	
5.2.2.10.09		118.450.000,00	
5.2.2.11		8.457.954.114,00	
5.2.2.11.01		2.700.249.290,00	
5.2.2.11.02		4.228.549.720,00	
5.2.2.11.03		1.529.155.104,00	
5.2.2.12		250.450.000,00	
5.2.2.12.01		76.900.000,00	
5.2.2.12.02		47.500.000,00	
5.2.2.12.03		13.500.000,00	
5.2.2.12.04		4.665.000,00	
5.2.2.12.06		51.300.000,00	
5.2.2.12.07		56.585.000,00	
5.2.2.13		570.322.560,00	
5.2.2.13.01		570.322.500,00	
5.2.2.14		285.265.000,00	
5.2.2.14.02		24.110.000,00	
5.2.2.14.03		90.100.000,00	
5.2.2.14.04		171.055.000,00	
5.2.2.15		23.099.587.996,00	
5.2.2.15.01		7.328.305.503,00	
5.2.2.15.02		15.771.282.493,00	
5.2.2.16		808.870.000,00	
5.2.2.16.01		16.000.000,00	
5.2.2.16.02		454.570.000,00	
5.2.2.16.03		338.300.000,00	
5.2.2.17		3.819.255.040,00	
5.2.2.17.01		2.402.995.000,00	
5.2.2.17.02		80.040.000,00	
5.2.2.17.03		470.500.000,00	
5.2.2.17.04		182.025.000,00	
5.2.2.17.05		683.695.040,00	
5.2.2.20		14.528.445.347,00	
5.2.2.20.01		30.000.000,00	
5.2.2.20.02		13.269.936,00	
5.2.2.20.03		16.250.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Pengolahan dan Pertanian	309.500.000,00	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.081.928.847,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Laboratorium	776.884.281,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.575.165.493,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bersejarah	91.602.500,00	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Jalan	4.120.543.190,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.419.869.600,00	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Jaringan Air	2.528.750.000,00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur selain Jalan, Jembatan, dan Jaringan Air	7.850.000,00	
5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	556.831.500,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.915.235.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	838.345.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.445.400.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	572.490.000,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Pengembangan Aplikasi Komputer	59.000.000,00	
5.2.2.22	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	1.772.615.150,00	
5.2.2.22.02	Belanja Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat	401.240.000,00	
5.2.2.22.03	Belanja Bangunan dan Gedung untuk Diserahkan kepada Masyarakat	763.540.250,00	
5.2.2.22.04	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	565.834.900,00	
5.2.2.22.05	Belanja Hewan dan Ternak untuk Diserahkan kepada Masyarakat	42.000.000,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Peralatan dan Mesin	431.698.100,00	
5.2.2.23.02	Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan	4.750.000,00	
5.2.2.23.03	Peralatan Kantor	5.800.000,00	
5.2.2.23.04	Perlengkapan Kantor	388.498.100,00	
5.2.2.23.05	Perlengkapan komputer	19.750.000,00	
5.2.2.23.09	Alat-alat Studio	8.000.000,00	
5.2.2.23.11	Alat-alat Ukur	4.900.000,00	
5.2.2.24	Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.033.976.500,00	
5.2.2.24.01	Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.033.976.500,00	
5.2.2.25	Belanja Barang Jasa Pelayanan Kecamatan	227.041.300,00	
5.2.2.25.01	Belanja Barang Jasa Pelayanan Bidang Pembangunan	58.862.300,00	
5.2.2.25.02	Belanja Barang Jasa Pelayanan Bidang Pemerintahan	73.400.500,00	
5.2.2.25.03	Belanja Barang Jasa Pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat	54.133.000,00	
5.2.2.25.04	Belanja Barang Jasa Pelayanan Bidang Ketentraman dan Ketertiban	40.645.500,00	
5.2.2.26	Belanja Pendukung Operasional Reses	439.500.000,00	
5.2.2.26.01	Belanja Pendukung Operasional Reses	439.500.000,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1		2	3	4
5.2.3	5.2.3.01	Belanja Modal	254.640.072.064,00	
	5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	17.274.800.000,00	
	5.2.3.01.03	Belanja modal Pengadaan tanah sarana kesehatan Puskesmas	175.000.000,00	
	5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	650.000.000,00	
	5.2.3.01.08	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah lanjutan dan kejuruan	120.000.000,00	
	5.2.3.01.19	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	2.500.000,00	
	5.2.3.01.29	Belanja modal Pengadaan tanah perkampungan	350.000.000,00	
	5.2.3.01.30	Belanja modal Pengadaan tanah pergudangan/tempat penimbunan material bahan baku	210.000.000,00	
	5.2.3.01.31	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum jalan	15.730.000.000,00	
	5.2.3.01.32	Belanja modal Pengadaan tanah Lainnya	37.300.000,00	
	5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	5.073.195.000,00	
	5.2.3.02.01	Belanja modal Pengadaan traktor	5.073.195.000,00	
	5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	3.028.735.000,00	
	5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	499.200.000,00	
	5.2.3.03.02	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor jeep	600.000.000,00	
	5.2.3.03.03	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon	1.218.035.000,00	
	5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	195.000.000,00	
	5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	516.500.000,00	
	5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	74.367.000,00	
	5.2.3.04.01	Belanja modal Pengadaan gerobak	74.367.000,00	
	5.2.3.06	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Tidak Bermotor	40.450.000,00	
	5.2.3.06	Belanja modal Pengadaan perahu karet	40.450.000,00	
	5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	25.900.000,00	
	5.2.3.08.01	Belanja modal Pengadaan peralatan bengkel sepeda motor	20.000.000,00	
	5.2.3.08.04	Belanja modal Pengadaan mesin kompresor	5.900.000,00	
	5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan	5.400.000,00	
	5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Alat Pertanian Lain	5.400.000,00	
	5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	328.165.616,00	
	5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tk	31.209.500,00	
	5.2.3.10.02	Belanja modal Pengadaan mesin hitung	34.267.546,00	
	5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	30.000.000,00	
	5.2.3.10.06	Belanja modal Pengadaan mesin jilid	6.250.000,00	
	5.2.3.10.07	Belanja modal Pengadaan mesin potong kertas	1.766.500,00	
	5.2.3.10.08	Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas	22.000.020,00	
	5.2.3.10.09	Belanja modal Pengadaan papan tulis elektronik	3.000.000,00	
	5.2.3.10.10	Belanja modal Pengadaan papan visual elektronik	35.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5. 2. 3. 10. 11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	19.052.964,00	
5. 2. 3. 10. 13	Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Rumput	52.672.086,00	
5. 2. 3. 10. 14	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	10.847.000,00	
5. 2. 3. 10. 15	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi	80.500.000,00	
5. 2. 3. 10. 16	Belanja Modal Pengadaan mesin jahit	1.600.000,00	
5. 2. 3. 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.711.584.185,00	
5. 2. 3. 11. 02	Belanja modal Pengadaan almari	308.781.850,00	
5. 2. 3. 11. 03	Belanja modal Pengadaan brankas	6.500.000,00	
5. 2. 3. 11. 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	162.256.400,00	
5. 2. 3. 11. 05	Belanja modal Pengadaan white board	21.769.456,00	
5. 2. 3. 11. 06	Belanja modal Pengadaan penunjuk waktu	200.000,00	
5. 2. 3. 11. 07	Belanja Modal Televisi	73.591.000,00	
5. 2. 3. 11. 08	Belanja Modal Perlengkapan Sound System	558.523.022,00	
5. 2. 3. 11. 09	Balanja Modal AC / Kipas Angin	540.331.815,00	
5. 2. 3. 11. 10	Belanja Modal Perlengkapan Arsip	10.787.000,00	
5. 2. 3. 11. 11	Belanja Modal Pengadaan VCD/DVD	2.726.000,00	
5. 2. 3. 11. 12	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama/Data	115.561.267,00	
5. 2. 3. 11. 13	Belanja Modal Layar Proyektor/LCD/MMP	171.159.745,00	
5. 2. 3. 11. 14	Belanja Modal Radio/Tape Recorder	4.707.000,00	
5. 2. 3. 11. 15	Belanja Modal Alat Olahraga	18.950.000,00	
5. 2. 3. 11. 16	Belanja Modal Perlengkapan kantor lainnya	715.739.630,00	
5. 2. 3. 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.061.923.599,00	
5. 2. 3. 12. 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	122.667.400,00	
5. 2. 3. 12. 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.196.971.468,00	
5. 2. 3. 12. 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	1.440.130.039,00	
5. 2. 3. 12. 04	Belanja modal Pengadaan printer	372.513.577,00	
5. 2. 3. 12. 05	Belanja modal Pengadaan scanner	26.900.000,00	
5. 2. 3. 12. 06	Belanja modal Pengadaan monitor/display	19.837.655,00	
5. 2. 3. 12. 07	Belanja modal Pengadaan CPU	15.500.000,00	
5. 2. 3. 12. 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	47.685.050,00	
5. 2. 3. 12. 09	Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer	164.909.410,00	
5. 2. 3. 12. 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	426.757.000,00	
5. 2. 3. 12. 11	Belanja Modal LCD/MMP	228.052.000,00	
5. 2. 3. 13	Belanja Modal Pengadaan Meubelair	2.877.445.474,00	
5. 2. 3. 13. 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	532.171.117,00	
5. 2. 3. 13. 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	120.768.000,00	
5. 2. 3. 13. 03	Belanja modal Pengadaan meja makan	800.000,00	
5. 2. 3. 13. 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	246.424.657,00	
5. 2. 3. 13. 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	150.192.700,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	4.900.000,00	
5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	24.070.000,00	
5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembarang	34.718.000,00	
5.2.3.13.11	Belanja Modal Pengadaan Kursi Tunggu	35.983.000,00	
5.2.3.13.12	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	59.618.000,00	
5.2.3.13.15	Belanja Modal Tempat Jemuran/ Hanger/ Tempat Handuk	1.200.000,00	
5.2.3.13.16	Belanja Modal Meja Telepon	600.000,00	
5.2.3.13.19	Belanja Modal Meja Kursi Belajar	20.000.000,00	
5.2.3.13.30	Belanja Modal Mebelair Lainnya	1.646.000.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	341.960.055,00	
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	77.675.000,00	
5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	4.373.000,00	
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	51.627.000,00	
5.2.3.14.05	Belanja modal Pengadaan kulkas	26.251.155,00	
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan rak piring	8.900.000,00	
5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	84.129.400,00	
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Memasak	89.004.500,00	
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	165.825.228,00	
5.2.3.15.02	Belanja modal Pengadaan jam dinding/meja	5.731.058,00	
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Korden/Karpet/Taplak Meja	10.055.790,00	
5.2.3.15.05	Belanja Modal Akuarium	60.000.000,00	
5.2.3.15.06	Belanja Modal Perlengkapan Tempat Tidur	87.770.380,00	
5.2.3.15.07	Belanja Modal Penghias Ruang Tidur	2.268.000,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	729.237.105,00	
5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	473.081.005,00	
5.2.3.16.02	Belanja modal Pengadaan handycam	125.160.000,00	
5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	35.675.000,00	
5.2.3.16.04	Dst.....	95.321.100,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	152.908.995,00	
5.2.3.17.01	Belanja modal Pengadaan telepon	14.420.000,00	
5.2.3.17.02	Belanja modal Pengadaan faksimili	7.350.000,00	
5.2.3.17.07	Belanja modal Pengadaan alat Candi	400.000,00	
5.2.3.17.08	Belanja Modal Peralatan/Komponen Komunikasi	98.226.995,00	
5.2.3.17.09	Belanja Modal Pengadaan Jaringan/Instalasi Internet	32.512.000,00	
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	46.400.000,00	
5.2.3.18.01	Belanja modal Pengadaan timbangan	14.800.000,00	
5.2.3.18.04	Belanja modal Pengadaan alat GPS	24.900.000,00	
5.2.3.18.11	Belanja Modal Pengadaan pH Meter	5.750.000,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4	
5. 2. 3. 18. 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Panjang (Meteran dan sejenisnya)	950.000,00		
5. 2. 3. 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	7.604.032.081,00		
5. 2. 3. 19. 01	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum	4.727.971.000,00		
5. 2. 3. 19. 04	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran mata	303.914.050,00		
5. 2. 3. 19. 07	Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan	372.000.000,00		
5. 2. 3. 19. 13	Belanja modal Pengadaan alat-alat farmasi	97.500.000,00		
5. 2. 3. 19. 15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan	2.102.647.031,00		
5. 2. 3. 20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	28.162.941.000,00		
5. 2. 3. 20. 01	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium biologi	74.313.769,00		
5. 2. 3. 20. 02	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium fisika/geologi/geodesi	191.452.500,00		
5. 2. 3. 20. 03	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium kimia	94.733.731,00		
5. 2. 3. 20. 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium peternakan	15.400.000,00		
5. 2. 3. 20. 07	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium perikanan,	203.840.000,00		
5. 2. 3. 20. 08	Belanja modal Pengadaan alat-alat laboratorium bahasa	2.265.000.000,00		
5. 2. 3. 20. 09	Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah	23.614.566.000,00		
5. 2. 3. 20. 10	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Lingkungan	60.500.000,00		
5. 2. 3. 20. 11	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kesehatan	1.643.135.000,00		
5. 2. 3. 21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	43.051.389.000,00		
5. 2. 3. 21. 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan	42.121.589.000,00		
5. 2. 3. 21. 05	Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas	929.800.000,00		
5. 2. 3. 22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	235.016.045,00		
5. 2. 3. 22. 04	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan penyebrangan diatas air	235.016.045,00		
5. 2. 3. 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	14.345.866.700,00		
5. 2. 3. 23. 03	Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan	1.550.000.000,00		
5. 2. 3. 23. 05	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi	11.361.305.000,00		
5. 2. 3. 23. 06	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum	1.343.876.000,00		
5. 2. 3. 23. 08	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air	50.000.000,00		
5. 2. 3. 23. 09	Belanja Modal Pengadaan Pompa Air	40.685.700,00		
5. 2. 3. 24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman Dan Hutan Kota	1.284.496.000,00		
5. 2. 3. 24. 01	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan	957.750.000,00		
5. 2. 3. 24. 02	Belanja Modal Pengadaan Lampu Taman	301.746.000,00		
5. 2. 3. 24. 04	Belanja Modal Pengadaan Taman	25.000.000,00		
5. 2. 3. 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan Telepon	2.633.347.281,00		
5. 2. 3. 25. 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	1.792.776.000,00		
5. 2. 3. 25. 02	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon	60.000.000,00		
5. 2. 3. 25. 03	Belanja Modal Pengadaan Genset	780.571.281,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	84.918.577.731,00	
5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	26.908.176.031,00	
5.2.3.26.03	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	50.000.000,00	
5.2.3.26.04	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	100.000.000,00	
5.2.3.26.08	Belanja modal pengac'aaan konstruksi/pembelian papan informasi/reklame	600.000,00	
5.2.3.26.10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pariwisata	10.200.000,00	
5.2.3.26.11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Sekolah	43.437.500.000,00	
5.2.3.26.12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pasar/Kios	1.367.000.000,00	
5.2.3.26.13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Kolam	6.000.000,00	
5.2.3.26.14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pagar	1.039.904.000,00	
5.2.3.26.17	Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan tempat olah raga	1.707.000.000,00	
5.2.3.26.19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Pengolah Limbah	644.276.000,00	
5.2.3.26.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Hotel/Resort/Wisma/Food Court	3.000.000.000,00	
5.2.3.26.23	Belanja Modal Rehabilitasi Bangunan	6.647.927.700,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	24.180.085.000,00	
5.2.3.27.09	Belanja modal Pengadaan buku bahasa dan sastra	70.000.000,00	
5.2.3.27.10	Belanja modal Pengadaan buku keagamaan	69.410.000,00	
5.2.3.27.11	Belanja modal Pengadaan buku sejarah	70.000.000,00	
5.2.3.27.13	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum	95.000.000,00	
5.2.3.27.15	Relanja modal Pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	3.300.000,00	
5.2.3.27.16	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi	124.500.000,00	
5.2.3.27.21	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan	31.500.000,00	
5.2.3.27.25	Belanja modal Pengadaan peta/atlas/globe	300.000,00	
5.2.3.27.27	Belanja Modal Pengadaan Buku Non Fiksi	23.716.075.000,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	22.150.000,00	
5.2.3.28.01	Belanja modal Pengadaan lukisan/foto	400.000,00	
5.2.3.28.08	Belanja modal pengadaan peralatan kesenian	21.750.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak Dan Tanaman	850.000,00	
5.2.3.29.03	Belanja modal Pengadaan tanaman	850.000,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air	2.857.304.469,00	
5.2.3.31.01	Belanja Mcdal Pengadaan Instalasi Air Limbah/Kotor	2.611.250.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air Minum	116.500.000,00	
5.2.3.31.03	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Limbah	129.554.469,00	
5.2.3.45	Belanja Modal Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	8.405.719.500,00	
5.2.3.45.05	Belanja Modal Dana BOS-Pengadaan Aset Tetap Lainnya	8.405.719.500,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6	PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain Penerimaan pinjaman dari Pemerintah Propinsi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Kembali atas Dana Bergilir PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR BKK PDAM BPD Jawa Tengah Cabang Purwokerto Banyumas Investama Jaya Badan Usaha Milik Swasta Masyarakat Pembayaran Pokok Utang Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah Daerah Lain Pemerintah daerah provinsi Pemberian Pinjaman Daerah	(85.214.515.966,00)	
6.1			
6.1.1		120.964.515.966,00	
6.1.1.04		115.464.515.966,00	
6.1.1.04.01		115.464.515.966,00	
6.1.4		2.500.000.000,00	
6.1.4.02		2.500.000.000,00	
6.1.4.02.01		2.500.000.000,00	
6.1.5		3.000.000.000,00	
6.1.5.01		3.000.000.000,00	
6.1.5.01.01		2.500.000.000,00	
6.1.5.01.02		500.000.000,00	
6.2		35.750.000.000,00	
6.2.1		15.000.000.000,00	
6.2.1.01		15.000.000.000,00	
6.2.1.01.01		15.000.000.000,00	
6.2.2		15.750.000.000,00	
6.2.2.02		14.250.000.000,00	
6.2.2.02.01		1.500.000.000,00	
6.2.2.02.02		10.250.000.000,00	
6.2.2.02.03		1.500.000.000,00	
6.2.2.02.05		1.000.000.000,00	
6.2.2.03		1.500.000.000,00	
6.2.2.03.02		1.500.000.000,00	
6.2.3		2.500.000.000,00	
6.2.3.02		2.500.000.000,00	
6.2.3.02.01		2.500.000.000,00	
6.2.4		2.500.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. Banyumas
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 07. 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	350.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 11	Belanja Makanan Dan Minuman	2.795.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 11. 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.795.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.825.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 15. 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.325.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 11. 5. 2. 2. 15. 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.500.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12	Sistem Pengelolaan Pendapatan Pasar	100.000.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.140.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 01. 01	Belanja alat tulis kantor	1.140.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 03. 12	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 06	Belanja Cetak Dan Penggandaan	250.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 06. 01	Belanja cetak	250.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 11	Belanja Makanan Dan Minuman	1.710.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 11. 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.710.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS	2.700.000,00	SURPLUS / (DEFISIT)
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 2. 17. 05	Belanja Bantuan Transport Peserta	2.700.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 3	Belanja Modal	49.200.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 3. 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	49.200.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 3. 12. 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	35.000.000,00	
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 3. 12. 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	10.000.000,00	SURPLUS / (DEFISIT)
1.15. 2.07.01. 18. 12. 5. 2. 3. 12. 04	Belanja modal Pengadaan printer	4.200.000,00	
		(13.316.318.388,00)	

Purwokerto, 31 Desember 2010

BUPATI BANYUMAS


MARDJOKO